

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Simpulan

Berdasarkan paparan tersebut terkait dengan Penilaian Kinerja Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bekasi, dapat disimpulkan bahwa Penilaian Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Bekasi masih perlu evaluasi secara rutin terkait dengan perencanaan dan realisasi anggaran secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bekasi yang mana dalam hal realisasinya masih belum direncanakan secara optimal dan sesuai kebutuhan organisasi. Dimana, masih terdapat kendala pada bagian perencanaan yang perlu diperhatikan secara kualitas sumber daya manusia-nya.

Lalu, menelaah dari bab IV pada bagian pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekonomis, dapat disimpulkan dari sisi ekonomis kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bekasi dari tahun anggaran 2020 -2023, dinilai telah memenuhi kriteria ekonomis. Hal ini dikarenakan, selama empat tahun ini menunjukkan presentasi diantara angka 90% sampai 100% (spending less).
2. Efisiensi, dapat disimpulkan dari sisi efisiensi kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bekasi dari tahun anggaran 2020 -2023, dinilai belum memenuhi kriteria efisiensi. Hal ini dikarenakan, selama empat tahun ini menunjukkan presentasi diantara angka 90% sampai 100% (belum spending wisely).
3. Efektifitas, dapat disimpulkan dari sisi efektifitas kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bekasi dari tahun anggaran 2020 -2023, dinilai telah memenuhi kriteria efektif. Hal ini dikarenakan, selama empat tahun ini menunjukkan presentasi diantara angka 90% sampai 100% (spending wisely). Walaupun dalam pelaksanaan penganggaran dangar dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti: kebijakan defisit anggaran, kebijakan pencapaian realisasi anggaran, kebijakan pemerintah pusat, dan kondisi darurat bencana

## 2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi berdasarkan konsep *value for money* yaitu :

### 1. Ekonomis

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus ada beberapa hal yang dianalisis agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang sebagian nilai ekonomisnya masih terdapat nilai 90%.

### 2. Efisiensi

Penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan harus mencapai minimal 60% setiap tahunnya. Alangkah baiknya, jika Dinas Pendidikan Kab. Bekasi lebih menekan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas atau kegiatan organisasi dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu mempertahankan kinerja ekonomisnya di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan lebih menjaga dan memperhatikan pos-pos biaya yang tidak begitu diperlukan sehingga terwujudnya penerimaan anggaran pendapatan tetap efisien.

### 3. Efektifitas

Realisasi anggaran di Dinas Pendidikan Kab. Bekasi seharusnya berjalan selaras dengan perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga penyerapan realisasi anggaran selain dapat mencapai angka minimal 90% setiap tahunnya, tetapi juga dapat menyentuh akar perkembangan organisasi.

Kualitas penggunaan anggaran dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang diprioritaskan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, seperti peningkatan literasi numerasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Berdasarkan upaya di atas, saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan melakukan monitoring dan penguatan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk selalu komitmen dalam pencapaian target penyerapan anggaran yang telah

disepakati dan juga melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun.

2. Melaksanakan sosialisasi dan sinkronisasi program kegiatan antara Bappeda dan Dinas Pendidikan agar selaras dan sesuai dengan program Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya
3. Perencana Dinas Pendidikan harus membuat suatu pedoman perencanaan kegiatan untuk bidang-bidang yang memiliki anggaran kegiatan/aktivitasnya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harus lebih memperhatikan kode rekening belanja di SIPD agar anggaran tepat guna dan sasaran.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmi
- Ananta, I. K. F. & Adnyani, I. G. (2016). *Pengaruh Disiplin Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Villa Mahapala Sanur-Denpasar*. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(2).
- Deddi dan Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- H Abdul Halim & Salim Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Haruman, Tendi. (2010). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kementrian Keuangan Nomor 467. (2014). *Pengelolaan Kinerja Anggaran*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UUP STIM YKPN.
- Mamesah. (1995). *Administrasi Keuangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327. (1996). *Kriteria Tingkat Ekonomis Anggaran Belanja*.
- Putra, Muhammadiyah Mulia. (2022). *Alokasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi)*. Thesis: Universitas Jambi.
- Mulyadi. (2009). *Sistem Terpadu Pengelolaam Kinerja Personel Berbasis Balance Scorecard*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mulyanto (2007). *Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. *Jurnal Region*. Vol. 2.No. 1. Januari

- Nur Hasanah, E. D. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Jurnal Ecobuss*, 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. (2006). Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19. (2020). Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah. Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249. (2011). *Anggaran Kinerja*. Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62. (2023). *Kinerja Anggaran*. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintah*. Indonesia.
- Peraturan Presiden RI Nomor 29. (2014). Pengelolaan Kinerja Anggaran. Indonesia
- Permendagri No.13. (2006). Keuangan Daerah. Indonesia
- Permendagri No.16. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia
- Putri, H. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Kebijakan Refocusing dan Relokasi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia. Thesis: Universitas Lampung.
- Sunarya, H. (2021). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Akuntansi*, 8.
- Suparmoko. (2000). Keuangan negara. Yogyakarta: BPFE.
- Syukriy Abdullah, A. J. (2020). Determinan Kinerja Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13.
- Christian, Engelbert. (2010). Pengukuran Kinerja Perusahaan Jasa Penerbangan di Indonesia dengan Metode Performance Prism. Tesis: Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Teuku Rully Hendrawan, M. S. (2021). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil . *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3, 65-74.
- Undang-Undang Nomor 1. (2004). *Perbendaharaan Negara*. Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1. (2022). *Pengelolaan APBD*. Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1. (2022). *Pengendalian APBD*. Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13. (2012). *Pendapatan Asli Daerah*. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15. (2004). Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17. (2003). Keuangan Negara. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23. (2014). Pembentukan Daerah. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28. (2009). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Provinsi. Indonesia.



**POLITEKNIK  
STIALAN  
JAKARTA**

Nomor : 2213/STIA.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan

Jakarta, 25 September 2023

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat  
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Gedung A2 lantai 2  
Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Kalis Endah Wahyuni  
NPM : 2143021125  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi. : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Analisis Kinerja Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik,  
  
Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.  


Tembusan :

1. Direktur;
2. Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kajur Administrasi Publik;
4. Kaprodi Program Magister Terapan.



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2  
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530  
Website: [www.disdik.bekasikab.go.id](http://www.disdik.bekasikab.go.id)

Bekasi, 02 Nopember 2023

Nomor : HM.04.04/4541/Disdik/XI/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian telah menyelesaikan Penelitian Tugas Akhir an. Kalis Endah Wahyuni

Kepada  
Yth. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta  
Di  
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Lembaga Administrasi Negara Politeknik STIA LAN Jakarta, nomor:2213/STIA.1.1/PPS.02.3, tanggal 25 September 2023, Perihal Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan, dengan ini kami telah menyetujui dan penelitian tersebut telah dilaksanakan.

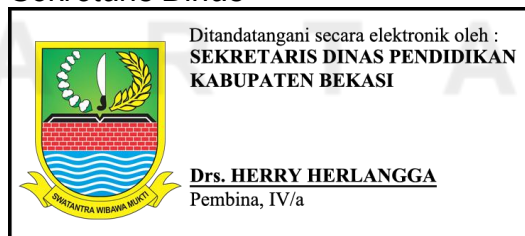
Selanjutnya dengan ini kami sampaikan bahwa pegawai sekaligus mahasiswa Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta dengan data sebagai berikut :

Nama : **KALIS ENDAH WAHYUNI**  
NPM : 2143021125  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Analisis Kinerja Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Pegawai tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam rangka penulisan tugas akhir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI**  
Sekretaris Dinas



Tembusan: disampaikan kepada;  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (sebagai laporan)

